

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dibahas teori yang akan mendasari penelitian ini dan studi terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini membahas apakah terdapat perbedaan pola perdagangan antarwilayah di Pulau Jawa pada masa sebelum COVID-19 dan pada saat pandemi COVID-19.

2.1 Perdagangan Antarwilayah

Sood (2011) mengatakan bahwa pada awal perdagangan antar negara-negara di dunia didasarkan pada prinsip pembagian kerja secara internasional sesuai dengan teori keunggulan yang dikemukakan David Ricardo. Artinya setiap negara mengkhususkan diri pada kegiatan ekonomi yang didasarkan pada keunggulan komparatif.

Dalam hal ini teori keunggulan komparatif juga dapat diterapkan pada perdagangan antarwilayah di Indonesia, sebagai contoh adalah Provinsi DKI Jakarta mengkhususkan diri dalam memproduksi kendaraan bermotor, dan Provinsi Sumatera Utara menghasilkan bensin pertalite. Dengan hal ini maka Provinsi DKI Jakarta menjual kendaraan bermotor kepada Provinsi Sumatera Utara dan sebaliknya Provinsi Sumatera Utara menjual bensin pertalite kepada DKI Jakarta. Dari penjualan ini maka kedua provinsi akan mendapatkan keuntungan.

Perdagangan antarwilayah memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian dalam masyarakat. Perdagangan antarwilayah dapat diartikan sebagai perdagangan dan pendistribusian barang dari satu provinsi ke provinsi lain yang berbeda dalam negara yang sama. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok antarwilayah yang cukup tinggi menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan antarwilayah. Perdagangan antarwilayah dari satu provinsi ke provinsi lain memiliki

peranan penting dalam perekonomian masyarakat bahkan memacu perekonomian nasional. Selain itu, perdagangan antarwilayah dapat memperkuat pasar dalam negeri dari pengaruh negatif yang terjadi pada pasar global. (BPS, 2021)

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan letak geografis, iklim, maupun kesuburan tanah. Adanya perbedaan sumber daya alam ini membuat wilayah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mendorong terjadinya kegiatan perdagangan antarwilayah di Indonesia. Pada umumnya, perdagangan antarwilayah ini memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah tetapi selain itu juga memiliki 2 tujuan lainnya, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar agar konsumen meningkat.

Menurut Syafira (2021), faktor pendorong dalam terjadinya perdagangan antarwilayah antara lain:

- Perbedaan faktor produksi yang dimiliki,
- Perbedaan tingkat harga antardaerah

Menurut Sihombing (2015), faktor yang menghambat terjadinya perdagangan antarwilayah antara lain:

- Infrastruktur yang kurang memadai
- Pelabuhan yang kurang memadai
- Biaya bongkar muat yang besar

2.2 Studi Terkait

Fokus penelitian Maipita (2018) adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan antarprovinsi Provinsi Sumatera Utara yang sangat penting dalam perekonomian Sumatera Utara. Total ekspor Sumatera Utara ke provinsi lain relatif lebih kecil dibandingkan dengan total impor dari provinsi lain ke Sumatera Utara. Sedangkan ekspor luar negeri Sumatera Utara jauh lebih besar dibandingkan dengan impor luar negeri. Sebagian besar impor dari provinsi lain diolah dan dikemas kemudian diekspor ke luar negeri dan sebahagian lagi untuk dikonsumsi di Sumatera Utara sendiri. Selama 1993-2004, penurunan impor luar negeri membawa dampak terhadap surplusnya neraca transaksi berjalan Sumatera Utara. Dengan demikian neraca perdagangan antarprovinsi mengalami defisit sedangkan neraca perdagangan luar negeri adalah surplus. Model perdagangan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari perdagangan antarprovinsi (*interregional trade*) dan perdagangan luar negeri (*international trade*). Pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan perdagangan antarprovinsi dengan perdagangan luar negeri. Perdagangan antarprovinsi lebih *mobile* dibandingkan dengan perdagangan luar negeri, hal ini akibat kuatnya peraturan antarnegara.

Penelitian Ridhwan *et al* (2012) mempunyai tujuan utama (1) mengkaji pola perdagangan komoditas pangan strategis antardaerah di Indonesia dan (2) melakukan pemetaan lebih lanjut terhadap perilaku pedagang khususnya yang terkait dengan aktivitas distribusi, system tata niaga dan pengelolaan stok (inventori) serta peranan pemerintah dan masyarakat yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan antardaerah. Inovasi baru dari riset ini jika dibandingkan dengan riset sebelumnya (khususnya untuk kasus Indonesia) terutama terletak pada (1) pendekatan analisis yang berorientasi pada pergerakan barang (mobilitas) sehingga faktor keterkaitan antardaerah menjadi sangat penting daripada melihat perdagangan yang cenderung statis dan seolah-olah antardaerah berdiri sendiri (*separated*); (2) survei dengan responden terbesar dan menggunakan teknologi satelit (*global positioning system*);

(3) sejumlah fokus riset yang dapat berkontribusi riil terhadap literatur dan pembuatan kebijakan. Dari hasil survei ditemukan temuan penting sebagai berikut: Pertama, perdagangan komoditas pangan cenderung sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa; Kedua, dari sisi penetapan harga jual, mayoritas responden menyatakan harga jual yang ditetapkan dilakukan dengan mengikuti harga jual pasar, pesaing dan harga internasional yang relatif lebih tinggi; Ketiga, guna mengoptimalkan keuntungannya, mayoritas pedagang cenderung menggunakan strategi “mengatur waktu” dalam pengendalian stoknya; dan Keempat, berdasarkan hasil analisis statistik diketahui adanya indikasi kluster harga spasial antarkabupaten/kota di daerah yang secara geografis berdekatan.

Tujuan penelitian Salfadri (2017) adalah untuk menyelidiki aliran perdagangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antardaerah komoditas telur ayam ras di Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam analisa ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei ke pedagang besar ayam ras di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan Analisa deskriptif terhadap data primer. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antardaerah komoditi telur ayam ras tersebut dianalisa dengan regresi berganda yang berdasarkan kepada model gravitasi yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan antardaerah komoditas telur ayam ras terjadi antardaerah yang tidak memproduksi komoditas tersebut dengan daerah yang memproduksi komoditas tersebut. Disamping itu ada daerah yang tidak menghasilkan komoditas tersebut tetapi jadi perantara antara daerah yang memproduksi telur ayam ras dengan daerah yang tidak menghasilkan komoditas telur ayam ras. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa dengan menggunakan data primer faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antardaerah komoditas telur ayam ras di Provinsi Sumatera Barat adalah selisih harga. Sedangkan dengan menggunakan data sekunder ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antarwilayah

komoditi telur ayam ras adalah: jumlah penduduk daerah tujuan, jumlah penduduk daerah asal dan jarak antar daerah asal dengan daerah tujuan.

Tujuan penelitian Susilowati (2017) adalah untuk menganalisis keragaan perdagangan antarpulau beras di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi dinamika perdagangan antarpulau beras dalam dua dekade terakhir, distribusi perdagangan beras serta margin yang diperoleh masing-masing pelaku perdagangan beras di Sulawesi Selatan. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait di Jakarta dan Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh melalui pendekatan survei kepada petani dan pedagang dan melalui diskusi kelompok dengan informan kunci di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisis menunjukkan dinamika volume beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan relatif berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Puncak pengiriman beras antarpulau terjadi pada bulan Oktober dan pangsa pengiriman beras terbesar berasal dari Kabupaten Pare-Pare (60,5%). Jakarta merupakan kota tujuan pengiriman beras utama dengan jumlah pengiriman terbesar, diikuti Belawan dan Ambon. Dengan pertimbangan karakteristik produksi, konsumsi beras, dan pasar beras yang terintegrasi, serta pentingnya beras sebagai komoditas ekonomi dan politik, maka kebijakan perdagangan antarpulau beras dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk stabilisasi harga beras. Untuk itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang mengelola jaringan kegiatan pemasaran antartempat dan antarwaktu (pengadaan, penyaluran, dan penyimpanan) secara nasional yang disesuaikan dengan besar kecilnya pasar beras di masing-masing wilayah/daerah.

Penelitian Supriadi *et al* (2018) melihat Perdagangan Antar Pulau (PAP) komoditas cabai dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja perdagangan serta merumuskan alternatif kebijakan yang mendukung pengembangan komoditas cabai. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif

terkait pola distribusi PAP, kebijakan terhadap regulasi, jaringan pemasaran, dan elastisitas transmisi harga. Hasil penelitian menunjukkan produksi cabai meningkat secara tajam di Provinsi Jawa Barat, sedangkan Jawa Tengah, Sumatera Barat, Lampung, dan provinsi lainnya relatif lambat kenaikannya karena masalah penyakit dan keterbatasan lahan. Stabilisasi produksi cabai merah di Pulau Jawa dan Sumatera Barat sangat menentukan stabilitas harga di wilayah lain. Produksi cabai di Sumatera Barat masih belum memenuhi permintaan, dimana arus distribusi cabai dari DIY dan Jawa Tengah ke Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat lebih banyak dari pada yang keluar provinsi. Pemerintah telah berupaya untuk stabilisasi harga cabai merah, menjaga keseimbangan antara daerah surplus dan defisit, serta memperkecil disparitas harga antardaerah, akan tetapi sejauh ini belum berhasil karena kendala rendahnya produksi sehingga permintaan kurang terpenuhi dan tingginya biaya transportasi pengangkutan. Pembangunan Stasiun Agribisnis (STA) seperti di Jawa Barat belum efektif menampung dan memasarkan hasil petani karena pemasaran sudah dikuasai oleh pedagang besar yang berkemampuan melakukan PAP. Secara umum beberapa faktor yang menjadikan rendahnya harga dan fluktuasi harga di tingkat petani disebabkan oleh beragamnya kualitas produk yang dihasilkan oleh petani, meningkatnya biaya produksi, informasi yang tidak simetri dan rendahnya daya tawar oleh pelaku pemasaran. Perlu upaya peningkatan dan stabilisasi produksi cabai merah di Pulau Jawa karena harga di Jawa sangat menentukan harga di wilayah lain, terutama di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Koordinasi vertikal dan kontrak pemasaran dapat digunakan sebagai alat manajemen risiko pendapatan dan harga karena ada ketentuan harga jual bagi petani.